



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikemas secara teknis.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja ini.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian tujuan dan sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja diharapkan pada tahun mendatang dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai upaya mewujudkan transparansi dalam akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Semoga dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Semarang,

2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b.

**Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Daerah**

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196610161992032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH ..	16
C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV PENUTUP	52
A. SIMPULAN	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	14
Tabel 2.1 Renstra 2018-2023	20
Tabel 2.2 Program dan Anggaran Pendukung Capaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	23
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Menurut Biro.....	25
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kerja	26
Tabel 3.2 Capaian Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Diusulkan dan Direalisasikan sebagai Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	30
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Biro-biro dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	35
Tabel 3.4 Rincian Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	3
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	12
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	12
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	13
Grafik 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	13
Grafik 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	14

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggung jawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan salah satunya yaitu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun sebagai wujud praktek *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja atas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 disampaikan dalam Laporan akuntabilitas ini. Laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban SETDA Provinsi Jawa Tengah kepada stakeholdernya, diharapkan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Sesuai Program Pembangunan Visi SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu: **Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari “Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan serangkaian kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 sasaran-sasaran kegiatan dan guna mendorong terwujudnya sasaran-sasaran yang dimaksud pada akhirnya dapat menciptakan Visi yang dicita-citakan seperti tersebut diatas. Secara umum capaian kinerja SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2019 dari 3 (Tiga) Sasaran kegiatan dapat dicapai 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**.

BAB I PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menerapkan prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Sehingga, akuntabilitas kinerja menjadi aspek penting yang diimplementasikan untuk mewujudkan efektifitas manajemen pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi". Maka, melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah" sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah. Selanjutnya dirumuskan pula tiga sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah; Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka pada laporan ini akan disajikan uraian hasil kinerja tujuan dengan tiga indikator dan tiga sasaran dengan dua puluh sembilan indikator.

Penyajian pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Laporan kinerja ini juga disampaikan kepada masyarakat dengan harapan hasil kinerja tujuan dan sasaran dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Kedudukan Sekretariat Daerah

- 1). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- 2). Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

b. Tugas Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

c. Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi Sekretariat Daerah antara lain:

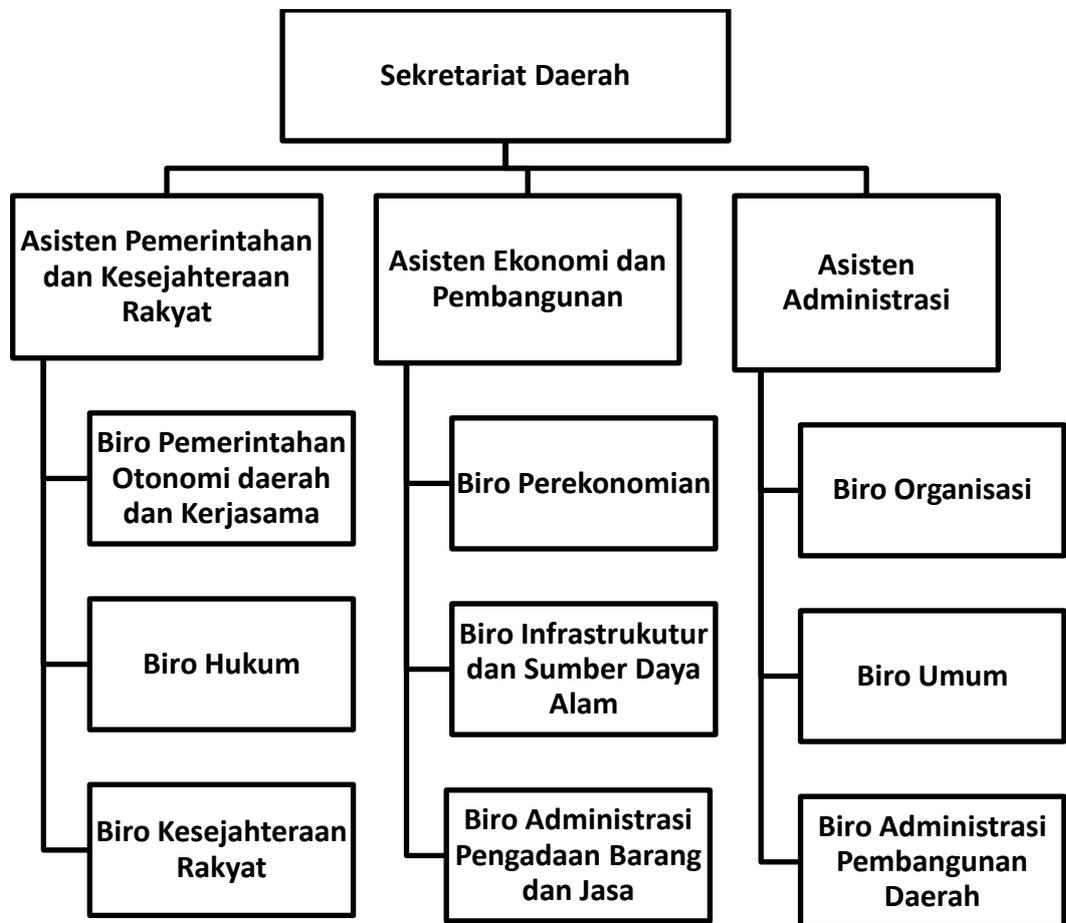
- 1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- 5). Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyesuaian atas pelaksanaan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, urusan pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah, selanjutnya dilaksanakan oleh organisasi baru yaitu Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Berikut merupakan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:

Grafik 1.1.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



1). Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan

dan analisis kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, membawahkan:

a). Bagian Pemerintahan, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
- (2). Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan
- (3). Sub Bagian Fasilitas Penataan Wilayah
- (4). Sub Bagian Tata Usaha Biro

b). Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal
- (2). Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah
- (3). Sub Bagian Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c). Bagian Kerjasama, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri
- (2). Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
- (3). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

2). Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum, membawahkan:

- a). Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (3). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
- b). Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (3). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
- c). Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (3). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah

3). Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan

Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:

- a). Bagian Keagamaan, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (3). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
- b). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (3). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
- c). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - (2). Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (3). Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga

4). Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata. membawahkan:

- a). Bagian Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
 - (2). Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan
 - (2). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan
- c). Bagian Perhubungan Penanaman Modal dan Pariwisata, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Perhubungan
 - (2). Sub Bagian Penanaman Modal dan Pariwisata

5). Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. membawahkan:

- a). Bagian Infrastruktur, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
 - (2). Sub bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro

- b). Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - (2). Sub bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - (3). Sub bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- c). Bagian Ketahanan pangan, kelautan, Perikanan dan Pertanian, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Ketahanan Pangan
 - (2). Sub Bagian Kelautan dan Perikanan
 - (3). Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

6). Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa, membawahkan:

- a). Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa
 - (2). Sub bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - (3). Sub bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- b). Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

- (2). Sub bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik
- c). Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - (2). Sub bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - (3). Sub bagian Tata Usaha Biro

7). Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi membawahkan:

- a). Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
 - (2). Sub Bagian pembinaan dan pengawasan Kelembagaan kabupaten/Kota
 - (3). Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
 - (4). Sub Bagian Tata usaha Asisten Administrasi
- b). Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Tata Laksana
 - (2). Sub Bagian Pelayanan Publik
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

- (2). Sub Bagian Reformasi Birokrasi
- (3). Sub Bagian Kepegawaian

8). Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan membawahkan:

- a). Bagian Rumah Tangga Setda, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Sarana dan Prasarana
 - (2). Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga
 - (3). Sub Bagian Keuangan
 - (4). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi
 - (2). Sub Bagian Publikasi dan Hubungan Media
 - (3). Sub Bagian Protokol
- c). Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Gubernur
 - (2). Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Wakil Gubernur
 - (3). Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan
 - (4). Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah

9). Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan membawahkan:

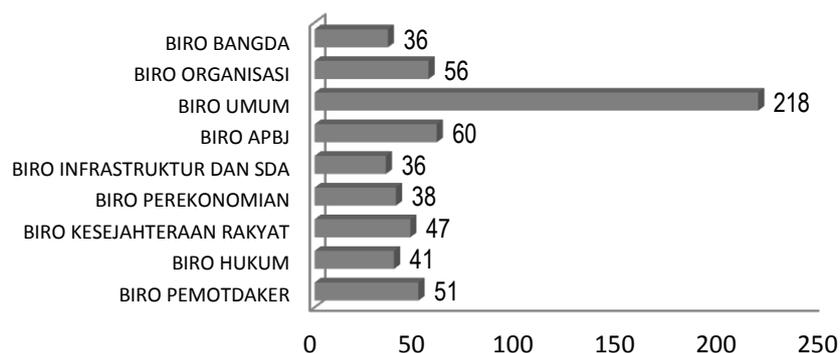
- a). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, sosial dan Budaya
 - (2). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
 - (3). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
- b). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
 - (2). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
 - (3). Sub bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - (2). Sub bagian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - (3). Sub bagian Penyusunan Program

1. Susunan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Dalam mengoptimalkan kinerja, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas. Sumber Daya Manusia (Pegawai) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 580 pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan golongan kepangkatan dan jabatan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Grafik 1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



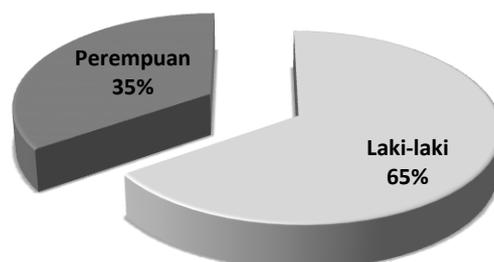
Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.3.

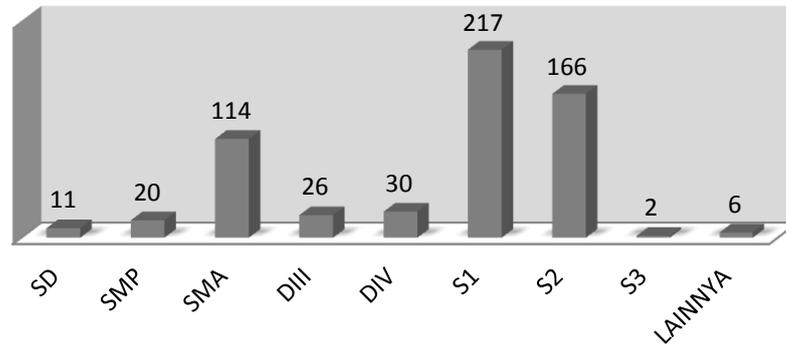
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

BIRO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
BIRO PEMOTDAKER	26	25
BIRO HUKUM	24	17
BIRO KESRA	25	22
BIRO PEREKONOMIAN	25	13
BIRO ISDA	21	15
BIRO APBJ	47	13
BIRO UMUM	157	61
BIRO ORGANISASI	28	28
BIRO BANGDA	25	11

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah



Grafik 1.4.
Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



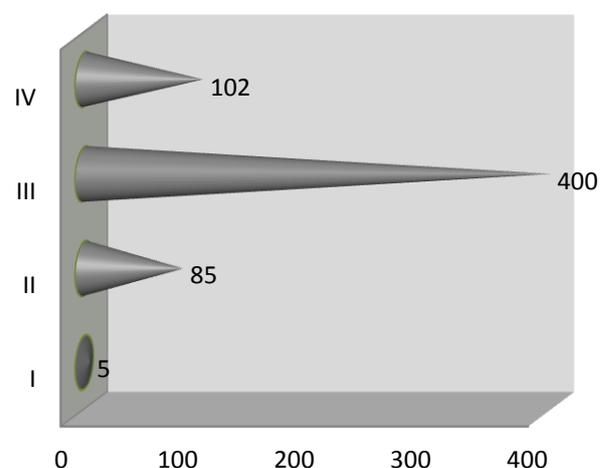
BIRO	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3	LAINNYA
BIRO PEMOTDAKER	0	1	5	1	6	14	24	0	0
BIRO HUKUM	0	0	3	2	0	22	14	0	0
BIRO KESRA	0	0	1	2	0	27	17	0	0
BIRO PEREKONOMIAN	0	0	7	1	3	11	17	0	1
BIRO ISDA	1	0	4		4	12	14	0	1
BIRO APBJ	0	0	4	7	2	29	17	1	0
BIRO UMUM	9	19	81	9	10	64	23	1	2
BIRO ORGANISASI	0	0	5	3	5	23	19	0	1
BIRO BANGDA	1	0	4	1	0	12	18	0	0

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.5.
Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan

BIRO	I	II	III	IV
BIRO PEMOTDAKER	2	35	14	
BIRO HUKUM	3	30	8	
BIRO KESRA		35	12	
BIRO PEREKONOMIAN	3	27	8	
BIRO ISDA	3	25	8	
BIRO APBJ	8	42	10	
BIRO UMUM	5	61	137	15
BIRO ORGANISASI	2	40	14	
BIRO BANGDA	3	24	9	

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

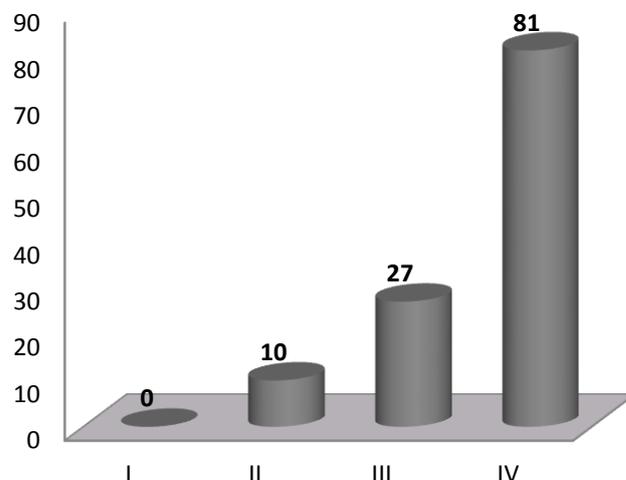


Grafik 1.6.

Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon

BIRO	I	II	III	IV
BIRO PEMOTDAKER	0	1	3	10
BIRO HUKUM	0	0	3	9
BIRO KESRA	0	1	3	9
BIRO PEREKONOMIAN	0	0	3	7
BIRO ISDA	0	1	3	8
BIRO APBJ	0	1	3	8
BIRO UMUM	0	1	3	11
BIRO ORGANISASI	0	1	3	10
BIRO BANGDA	0	1	3	9

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah



2. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.

Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO.	KODE BID BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	1.3.1.01	TANAH	17
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	37
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	346
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	12.494
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.002
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	12

NO.	KODE BID BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	2
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	10
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	1.697
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	45
22	1.3.3.02	MONUMEN	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-
27	1.3.4.03	INSTALASI	58
28	1.3.4.04	JARINGAN	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.611
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK	72
31	1.3.5.03	HEWAN	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
		JUMLAH	31.405

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2019

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH

Permasalahan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Revitalisasi peran Sekretariat Daerah dalam mewujudkan efektivitas manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
2. Peningkatan sinergi penyusunan dan pengendalian kebijakan berbasis bukti pada seluruh urusan pembangunan daerah,
3. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemetintahan daerah,
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dengan target kinerja yang spesifik dan terukur sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat penjelasan kinerja program dan kegiatan pada setiap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

Upaya perwujudan visi-misi pemerintahan daerah menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen pengendali atas upaya pencapaian visi-misi pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

1. Visi-Misi

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam mewujudkan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Visi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari **"Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi-misi dari

Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah mendukung perwujudan melaksanakan reformasi birokrasi yang mampu merespon, memfasilitasi, dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

2. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, melalui Renstra 2018-2023 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan tujuan sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

“Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”

Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan tiga Sasaran untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tujuan dan Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional dengan rumusan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut termuat dalam Bab IV Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 berikut:

Tabel 2.1.
RENSTRA 2018-2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target 2019
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	80
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81
	Persentase Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan	80

Bantuan Keuangan	
Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90
peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90
Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,10
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73
Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya	25
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85
Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100

	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come*, dan harus ada kesinambungan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah melakukan pendatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja tahun 2019.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 9 program, 153 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 161.124.000.000 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, yaitu:

Tabel 2.2.

**Program dan Anggaran Pendukung Capaian Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan daerah</i>		
	Sasaran: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah		
1.1	Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.786.539.000	APBD
1.2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.105.000.000	APBD
	Sasaran: Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		

1.3	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Rp. 32.538.410.000	APBD
1.4	Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	Rp. 3.513.000.000	APBD
1.5	Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.210.978.000	APBD
1.6	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 2.685.290.000	APBD
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah			
1.7	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	Rp. 29.240.000.000	APBD
1.8	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 81.756.483.000	APBD
1.9	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 288.300.000	APBD

Tabel 2.3.
Alokasi Anggaran Menurut Biro

No	Nama Biro	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Biro Tata Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama	Rp. 8.500.000.000
2	Biro Hukum	Rp. 6.825.000.000
3	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 12.799.410.000
4	Biro Perekonomian	Rp. 6.922.000.000
5	Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam	Rp. 6.900.000.000
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp. 12.420.000.000
7	Biro Organisasi	Rp. 7.250.000.000
8	Biro Umum	Rp. 99.429.590.000
9	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-
TOTAL		Rp. 161.124.000.000

Sumber : Daftar Pelaksanaan Anggaran Setda tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 merumuskan 3 (tiga) target kinerja pada level tujuan dan 29 (dua puluh sembilan) target kinerja pada level sasaran. Keduapuluh sembilan indikator target kinerja tersebut dikelompokkan dalam tiga rumusan kinerja sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) rentang capaian dan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 :

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah

Indikator Tujuan : Persentase Kebijakan yang Efektif

Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019		% Tingkat Capaian 2019	Target Renstra	% Tingkat Capaian terhadap Renstra
	Target	Realisasi			
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase Kebijakan yang Efektif	80	93,02	116,28	84	110,74
Sasaran: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah					
Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	85	117,65
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117,65	85	117,65
Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	71	101,43	90	78,89
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	85,71	100,84	85	100,84
Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80	83,05	103,81	96	86,51
Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90	100	111,11	94	106,38
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	100	123,46	94	106,38
Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah			110,85		102,04

Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** melalui 7 (tujuh) indikator dengan rata-rata tingkat capaian 110,85% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** secara linear sinergis dengan pencapaian indikator kinerja **Tujuan persentase kebijakan yang efektif** yang mampu direalisasikan sebesar **93,02%** dan dengan tingkat capaian **116,28%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah pelaksanaan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui perumusan tema kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pelaksana, proses analisis permasalahan dan alternatif kebijakan yang didukung data lapangan, dan koordinasi pengawalan pelaksanaan kebijakan oleh perangkat daerah pelaksana secara intensif.

Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan sinergi dan efektifitas kebijakan daerah antara lain berupa adanya kompleksitas masalah yang berbeda-beda pada setiap kebijakan mengharuskan pendalaman permasalahan, penggalian data, pembelajaran Banchmarking, perumusan alternatif kebijakan dan rekomendasi yang membutuhkan waktu dan kemampuan analisis kebijakan pada berbagai level sesuai dengan setiap kebutuhan pemecahan masalah pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Biro-biro untuk menangani sejumlah hambatan dan tantangan antara lain dengan meningkatkan pemahaman terhadap masalah pembangunan melalui proses penggalian data dan informasi praktik-praktik terbaik serta menggalang kerjasama dengan sejumlah tenaga ahli yang kompeten di bidangnya dalam merumuskan berbagai alternatif penyelesaian masalah kebijakan pembangunan daerah secara praktis dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja **Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kebijakan yang efektif di Provinsi Jawa Tengah didukung dengan alokasi APBD sebesar Rp 8.891.539.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.488.100.769,- atau 95,46%. Penggunaan anggaran yang mampu mewujudkan kinerja Sangat Baik pada target kinerja sasaran dan

tujuan ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan belanja, yang dalam hal ini mencapai **4,54%**.

Terdapat dua program prioritas yang secara khusus diorientasi untuk mendukung pencapaian sinergitas kebijakan daerah dan kebijakan yang efektif, yaitu: Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Gambaran realisasi pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah yang sinergis dengan pencapaian kinerja Tujuan Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah pada aspek peningkatan persentase kebijakan yang efektif dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)}} \times 100\%$$

Realiasi persentase kebijakan yang efektif dihasilkan dengan membandingkan jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang direalisasikan sebagai kebijakan dengan seluruh jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*). Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) adalah seluruh kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang dihasilkan serta diusulkan kepada pimpinan. Sedangkan jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang direalisasikan sebagai kebijakan adalah kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang telah dimanfaatkan oleh pimpinan dan dilaksanakan sebagai kebijakan. Berikut hasil penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) oleh biro-biro lingkup Setda:

Tabel 3.2.
Capaian Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) Diusulkan dan Direalisasikan sebagai Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Biro	Kebijakan dan Ringkas Kebijakan yang diusulkan	Kebijakan dan Ringkas Kebijakan yang direalisasikan sebagai Kebijakan	% Ketercapaian
1	Biro Perekonomian	59	49	83.05
2	Biro Kesra	6	6	100
3	Biro Isda	24	24	100
4	Biro Pemotda	76	36	47.36
5	Biro Hukum	550	550	100
6	Biro Adm. Bangda	1	1	100
JUMLAH		716	666	93,02

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung realisasi capaian indikator tujuan persentase kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase kebijakan yang efektif} = \frac{666}{716} \times 100\% = 93.02\%$$

Indikator persentase kebijakan yang efektif yang terealisasi sebesar 93,02% dan berada pada tingkat capaian 116,28% yang masuk dalam kategori kinerja Sangat Baik didukung oleh pencapaian kinerja pada level kinerja sasaran yang merupakan proses kolaborasi antar biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dan dengan OPD pelaksana serta dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kinerja program dan kegiatan pada lingkup sasaran pertama ini sangat baik dan efisien.

Lingkup kinerja sasaran kedua Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang juga diorientasi untuk mewujudkan **Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**. Berikut gambaran capaian kinerja sasaran kedua Setda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah

Indikator Tujuan : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019		% Tingkat Capaian 2019	Target Renstra	% Tingkat Capaian terhadap Renstra
	Target	Realisasi			
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	86,36	107,95	84	102,81
Sasaran: Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	81	101,25	85	95,29
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	96,6	120,75	85	113,65
Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	95,63	119,54	84	113,85
Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90	100	111,11	94	106,38
peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90	100	111,11	94	106,38
Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90	100	111,11	94	106,38
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19	24,78	130,42	31	79,94
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,1	92,63	177,79	100	92,63
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	75	102,74	92	81,52

Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	160	85	47,06
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	100	125	96	104,17
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	88,46	104,07	85	104,07
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	87,5	102,94	95	92,11
Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	96,93	161,55	70	138,47
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	85	100,84
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	75,00	93,75	96	78,13
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100	100	100	100,00
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	85,41	100,48	85	100,48
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	90	90	100	90,00
Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100,00
Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100,00
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>			115,45		97,68

Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** melalui 21 (dua puluh satu) indikator dengan rata-rata tingkat capaian 115,45% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** secara linear sinergis dengan pencapaian kinerja **indikator Tujuan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** yang mampu direalisasikan sebesar **86,36%** dan dengan tingkat capaian **107,95%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah adanya kebijakan pembinaan OPD pada lingkup Biro dan Asisten, koordinasi yang intensif Biro-biro dengan OPD pelaksana, dan adanya instrumen pengendalian kinerja (*e-controlling* kinerja) yang efektif dalam pengendalian kinerja pembangunan.

Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan khususnya dalam mengungkit capaian kinerja perangkat daerah antara lain masih adanya persepsi yang sama tentang fungsi Setda sebagai pengendali kinerja pembangunan, masih adanya indikator utama perangkat daerah yang tidak secara langsung tercermin dalam penganggaran dan aktivitas pelaksanaan kegiatan, dan adanya indikator yang capaiannya tergantung pada rilis data pihak lain.

Upaya yang dilakukan oleh Biro-biro untuk menangani sejumlah hambatan dan tantangan antara lain dengan meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi biro-biro sebagai koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah, mendorong agar OPD merumuskan rencana aksi dalam pencapaian kinerja utama perangkat daerah, melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai stakeholders terkait agar melakukan rilis data/informasi agar penilaian kinerja dapat dilakukan lebih baik, serta memanfaatkan sistem informasi capaian kinerja melalui *e-controlling* kinerja.

Pencapaian kinerja **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

didukung dengan alokasi APBD sebesar Rp 37.347678.000,- dengan realisasi sebesar Rp 35.646.202.025- atau 95,44%. Penggunaan anggaran yang mampu mewujudkan kinerja dengan Sangat Baik pada target kinerja sasaran dan tujuan ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan belanja, yang dalam hal ini mencapai **4,56%**.

Terdapat empat program prioritas yang secara khusus diorientasi untuk mewujudkan **Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dan capaian kinerja perangkat daerah, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan pencapaian Sasaran: Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Tujuan untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah juga tercapai. Hal tersebut ditunjukkan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi 86,36% pada Tahun 2019 , dengan tingkat ketercapaian sebesar 107,95% dari target atau berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Realisasi pencapaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang sinergis dengan pencapaian Tujuan Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah pada aspek peningkatan persentase capaian kinerja perangkat daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah Target IKU Perangkat Daerah yang tercapai}}{\text{Jumlah target IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Realiasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dihasilkan dengan membandingkan jumlah Target IKU Perangkat Daerah yang tercapai dengan seluruh jumlah target IKU Perangkat Daerah.

Berikut ini disampaikan rincian IKU Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta IKU Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibawah ampunan biro-biro dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Pengampu	Jumlah Target IKU Perangkat Daerah	Jumlah Target IKU Perangkat Daerah yang tercapai	Ketercapaian
1	Sekretariat Daerah	32	30	93,75%
2	Biro Kesra	48	41	85,42%
3	Biro Perekonomian	10	9	90,00%
4	Biro Isda	40	30	75%
5	Biro Bangda	7	6	85,71%
6	Biro Organisasi	12	12	100,00%
7	Biro Pemotdaker	3	3	100,00%
8	Biro Umum	2	2	100,00%
JUMLAH		154	133	86,36%

berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung realisasi capaian indikator tujuan persentase kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah} = \frac{133}{154} \times 100\% = 86,36\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama OPD memperlihatkan bahwa sebanyak 133 Indikator atau 86,36% tercapai dan berada pada tingkat capaian **107,95%** yang masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik** didukung oleh pencapaian kinerja pada level kinerja sasaran yang merupakan proses kolaborasi antar biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dan dengan OPD ampunan masing-masing biro. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kinerja program dan kegiatan pada lingkup **sasaran kedua ini sangat baik dan efisien.**

Lingkup kinerja sasaran ketiga Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah** yang penilaiannya sekaligus sebagai penilaian indikator tujuan ketiga Setda, yaitu: **Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda.** juga diorientasi untuk mewujudkan **Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah.** Berikut gambaran capaian kinerja sasaran ketiga Setda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tujuan	: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah
Indikator Tujuan	: Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda
Sasaran	: Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019		% Tingkat Capaian 2019	Target Renstra	% Tingkat Capaian terhadap Renstra
	Target	Realisasi			
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	75,63	100,84	80	94,54%
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah					
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75	75,63	100,84	80	94,54%
Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah			100,84		95,54

Kualitas Pelayanan Umum di Setda tahun 2019 sebesar 75,63% diukur dengan menggunakan hasil Survei IKM Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan. Untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibutuhkan penghitungan bobot nilai rata-rata tertimbang atau disebut nilai penimbang, yang tergantung dari jumlah unsur indikator layanan yang dievaluasi. Instrumen angket penilaian memiliki 14 (empat belas) unsur indikator layanan meliputi: Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Pelayanan.

Setda Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk memberikan layanan yang prima baik kepada Pimpinan Daerah (Gubernur Dan Wakil Gubernur), Pimpinan lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah, pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkup Setda terkait dengan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan keberlangsungan operasional kantor Setda serta kepada masyarakat dengan aplikasi Layanan Biro Umum yang dirintis sejak tahun 2016.

Pelayanan kepada masyarakat untuk peminjaman aset milik Setda Provinsi Jawa Tengah ada yang tidak dipungut biaya/gratis (Gedung Gradhika Bhakti Praja, Gedung Wisma Perdamaian, Ruang Rapat Gedung B 5, Ruang Rapat Gedung E 4, Venue/Halaman Setda, Halaman Wisma Perdamaian) dan ada yang berbayar (Gedung Wanita, Gedung Dharma Wanita, Gedung PKK Ungaran, Koperasi) dimana dapat dilakukan secara langsung lewat aplikasi secara online dan terbuka dan dapat melakukan pinjam pakai. Didalam aplikasi Layanan Biro Umum, terdapat survey pelayanan yang dilakukan apakah pelayanan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, disebabkan oleh arahan

pimpinan untuk melaksanakan pelayanan prima, adanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, terwujudnya tertib penatausahaan keuangan, dan kerjasama antar komponen biro di lingkup Setda dan dengan stakeholder terkait. Hambatan/tantangan dalam peningkatan pelayanan Setda adalah lingkup pelayanan kerumahtanggaan dan umum yang beragam, sasaran layanan yang banyak dan harus menjangkau seluruh biro-biro lingkup Setda. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menerapkan e-layanan yang terdiri dari layanan peminjaman kendaraan, peminjaman gedung, peminjaman ruang rapat, dan peminjaman venue. Selain itu juga dikembangkan penilaian pelayanan secara online.

Guna mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dialokasikan APBD sebesar Rp Rp 104.964.783.000 dengan realisasi sebesar Rp 97.149.745.215 atau 92,55% dengan penggunaan anggaran yang telah sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar **7,45%**.

Terdapat tiga program prioritas yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, yaitu: Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perangkat Daerah; Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan; serta Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan pencapaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, maka Tujuan untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah juga tercapai. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kinerja program dan kegiatan pada lingkup **sasaran ketiga ini sangat baik dan efisien.**

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar 150.485.141.223 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Rincian Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)
			Rp	Rp	6=4-3
1	2	3	4		6=4-3
4.06 4 6 3 0 0 4	PENDAPATAN	1,906,250,000	1,891,774,800		-14,475,200
4.06 4 6 3 0 0 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,906,250,000	1,891,774,800		-14,475,200
4.06 4 6 3 0 0 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,906,250,000	1,891,774,800		-14,475,200
4.06 4 6 3 0 0 5	BELANJA	257,017,599,000	238,255,477,442		18,762,121,558
4.06 4 6 3 0 0 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	95,893,599,000	87,770,336,219		-8,123,262,781
4.06 4 6 3 0 0 5 1 1	Belanja Pegawai	95,893,599,000	87,770,336,219		-8,123,262,781
4.06 4 6 3	BELANJA LANGSUNG	161,124,000,000	150,485,141,223		10,638,858,777
4.06 4 6 3 1	MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	81,756,483,000	76,284,312,335		-5,472,170,665
4.06 4 6 3 1 1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1,700,000,000	1,540,078,778		-159,921,222
4.06 4 6 3 1 1 5 2 1	Belanja Pegawai	666,000,000	579,600,000		-86,400,000
4.06 4 6 3 1 1 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,034,000,000	960,478,778		-73,521,222
4.06 4 6 3 1 2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	977,993,000	930,623,050		-47,369,950
4.06 4 6 3 1 2 5 2 1	Belanja Pegawai	5,000,000	3,000,000		-2,000,000
4.06 4 6 3 1 2 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	972,993,000	927,623,050		-45,369,950
4.06 4 6 3 1 3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah	7,550,000,000	6,050,635,162		-1,499,364,838
4.06 4 6 3 1 3 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	7,550,000,000	6,050,635,162		-1,499,364,838
4.06 4 6 3 1 4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	1,000,000,000	957,966,304		-42,033,696
4.06 4 6 3 1 4 5 2 1	Belanja Pegawai	74,400,000	73,600,000		-800,000
4.06 4 6 3 1 4 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	925,600,000	884,366,304		-41,233,696

4.06	4	6	3	1	5			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12,225,000,000	11,879,031,266	-345,968,734	
4.06	4	6	3	1	5	5	2	1	Belanja Pegawai	5,749,066,000	5,644,215,412	-104,850,588
4.06	4	6	3	1	5	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	6,475,934,000	6,234,815,854	-241,118,146
4.06	4	6	3	1	6				Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	9,451,900,000	8,235,374,812	-1,216,525,188
4.06	4	6	3	1	6	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	9,451,900,000	8,235,374,812	-1,216,525,188
4.06	4	6	3	1	7				Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	10,936,000,000	10,407,567,575	-528,432,425
4.06	4	6	3	1	7	5	2	1	Belanja Pegawai	12,000,000	12,000,000	0
4.06	4	6	3	1	7	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	10,924,000,000	10,395,567,575	-528,432,425
4.06	4	6	3	1	8				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah	125,000,000	124,971,000	-29,000
4.06	4	6	3	1	8	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	125,000,000	124,971,000	-29,000
4.06	4	6	3	1	10				Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	5,200,000,000	4,869,265,250	-330,734,750
4.06	4	6	3	1	10	5	2	1	Belanja Pegawai	124,347,000	124,347,000	0
4.06	4	6	3	1	10	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	5,075,653,000	4,744,918,250	-330,734,750
4.06	4	6	3	1	11				Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor	12,225,590,000	12,079,386,903	-146,203,097
4.06	4	6	3	1	11	5	2	3	Belanja Modal	12,225,590,000	12,079,386,903	-146,203,097
4.06	4	6	3	1	13				Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	2,440,000,000	2,372,974,622	-67,025,378
4.06	4	6	3	1	13	5	2	3	Belanja Modal	2,440,000,000	2,372,974,622	-67,025,378
4.06	4	6	3	1	14				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	650,000,000	597,430,518	-52,569,482
4.06	4	6	3	1	14	5	2	1	Belanja Pegawai	1,750,000	1,750,000	0
4.06	4	6	3	1	14	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	648,250,000	595,680,518	-52,569,482
4.06	4	6	3	1	15				Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	250,000,000	230,142,009	-19,857,991
4.06	4	6	3	1	15	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	250,000,000	230,142,009	-19,857,991
4.06	4	6	3	1	16				Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	200,000,000	187,357,500	-12,642,500
4.06	4	6	3	1	16	5	2	1	Belanja Pegawai	600,000	-	-600,000
4.06	4	6	3	1	16	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	199,400,000	187,357,500	-12,042,500
4.06	4	6	3	1	20				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	1,550,000,000	1,462,049,450	-87,950,550
4.06	4	6	3	1	20	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,550,000,000	1,462,049,450	-87,950,550
4.06	4	6	3	1	21				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah	10,225,000,000	9,799,797,544	-425,202,456

4.06	4	6	3	1	21	5	2	1	Belanja Pegawai	37,200,000	16,000,000	-21,200,000
4.06	4	6	3	1	21	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	10,187,800,000	9,783,797,544	-404,002,456
4.06	4	6	3	1	22				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah	4,500,000,000	4,026,348,006	-473,651,994
4.06	4	6	3	1	22	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	4,500,000,000	4,026,348,006	-473,651,994
4.06	4	6	3	1	23				Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550,000,000	533,312,586	-16,687,414
4.06	4	6	3	1	23	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	550,000,000	533,312,586	-16,687,414
4.06	4	6	3	2					PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	288,300,000	281,295,047	-7,004,953
4.06	4	6	3	2	1				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	188,300,000	182,965,300	-5,334,700
4.06	4	6	3	2	1	5	2	1	Belanja Pegawai	900,000	600,000	-300,000
4.06	4	6	3	2	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	187,400,000	182,365,300	-5,034,700
4.06	4	6	3	2	2				Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000	98,329,747	-1,670,253
4.06	4	6	3	2	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	100,000,000	98,329,747	-1,670,253
4.06	4	6	3	15					PENINGKATAN SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,786,539,000	6,389,600,769	-396,938,231
4.06	4	6	3	15	1				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan Dan Aset	111,700,000	107,986,245	-3,713,755
4.06	4	6	3	15	1	5	2	1	Belanja Pegawai	1,000,000	1,000,000	0
4.06	4	6	3	15	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	110,700,000	106,986,245	-3,713,755
4.06	4	6	3	15	2				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	250,000,000	227,474,895	-22,525,105
4.06	4	6	3	15	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	250,000,000	227,474,895	-22,525,105
4.06	4	6	3	15	3				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm	500,000,000	494,102,100	-5,897,900
4.06	4	6	3	15	3	5	2	1	Belanja Pegawai	20,100,000	19,600,000	-500,000
4.06	4	6	3	15	3	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	479,900,000	474,502,100	-5,397,900
4.06	4	6	3	15	4				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan	500,000,000	385,777,534	-114,222,466
4.06	4	6	3	15	4	5	2	1	Belanja Pegawai	800,000	800,000	0
4.06	4	6	3	15	4	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	499,200,000	384,977,534	-114,222,466
4.06	4	6	3	15	5				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi	300,000,000	270,651,377	-29,348,623
4.06	4	6	3	15	5	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	300,000,000	270,651,377	-29,348,623
4.06	4	6	3	15	6				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan	123,000,000	114,878,019	-8,121,981
4.06	4	6	3	15	6	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	123,000,000	114,878,019	-8,121,981

4.06	4	6	3	15	7				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata	165,000,000	156,000,184	-8,999,816
4.06	4	6	3	15	7	5	2	1	Belanja Pegawai	2,000,000	2,000,000	0
4.06	4	6	3	15	7	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	163,000,000	154,000,184	-8,999,816
4.06	4	6	3	15	8				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan	50,000,000	49,563,000	-437,000
4.06	4	6	3	15	8	5	2	1	Belanja Pegawai	8,200,000	8,200,000	0
4.06	4	6	3	15	8	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	41,800,000	41,363,000	-437,000
4.06	4	6	3	15	9				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	40,000,000	31,207,400	-8,792,600
4.06	4	6	3	15	9	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	40,000,000	31,207,400	-8,792,600
4.06	4	6	3	15	10				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan	125,000,000	68,111,860	-56,888,140
4.06	4	6	3	15	10	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	125,000,000	68,111,860	-56,888,140
4.06	4	6	3	15	11				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan	50,000,000	40,713,500	-9,286,500
4.06	4	6	3	15	11	5	2	1	Belanja Pegawai	4,375,000	3,375,000	-1,000,000
4.06	4	6	3	15	11	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	45,625,000	37,338,500	-8,286,500
4.06	4	6	3	15	12				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	40,000,000	37,911,000	-2,089,000
4.06	4	6	3	15	12	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	40,000,000	37,911,000	-2,089,000
4.06	4	6	3	15	13				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	40,000,000	35,910,096	-4,089,904
4.06	4	6	3	15	13	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	40,000,000	35,910,096	-4,089,904
4.06	4	6	3	15	14				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kependudukan Dan Cacatan Sipil	40,000,000	40,000,000	0
4.06	4	6	3	15	14	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	40,000,000	40,000,000	0
4.06	4	6	3	15	15				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	40,000,000	30,380,700	-9,619,300
4.06	4	6	3	15	15	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	40,000,000	30,380,700	-9,619,300
4.06	4	6	3	15	16				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pu Dan Penataan Ruang	400,000,000	375,780,133	-24,219,867
4.06	4	6	3	15	16	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	400,000,000	375,780,133	-24,219,867
4.06	4	6	3	15	17				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	400,000,000	395,115,800	-4,884,200
4.06	4	6	3	15	17	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	400,000,000	395,115,800	-4,884,200

4.06	4	6	3	15	18				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	200,000,000	188,746,286	-11,253,714
4.06	4	6	3	15	18	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	200,000,000	188,746,286	-11,253,714
4.06	4	6	3	15	19				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	200,000,000	197,800,780	-2,199,220
4.06	4	6	3	15	19	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	200,000,000	197,800,780	-2,199,220
4.06	4	6	3	15	20				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	100,000,000	99,487,600	-512,400
4.06	4	6	3	15	20	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	100,000,000	99,487,600	-512,400
4.06	4	6	3	15	21				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	100,000,000	99,134,900	-865,100
4.06	4	6	3	15	21	5	2	1	Belanja Pegawai	6,000,000	5,600,000	-400,000
4.06	4	6	3	15	21	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	94,000,000	93,534,900	-465,100
4.06	4	6	3	15	22				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan	200,000,000	187,735,500	-12,264,500
4.06	4	6	3	15	22	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	200,000,000	187,735,500	-12,264,500
4.06	4	6	3	15	23				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	73,751,000	53,775,000	-19,976,000
4.06	4	6	3	15	23	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	73,751,000	53,775,000	-19,976,000
4.06	4	6	3	15	24				Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	1,420,088,000	1,392,986,340	-27,101,660
4.06	4	6	3	15	24	5	2	1	Belanja Pegawai	2,500,000	2,500,000	0
4.06	4	6	3	15	24	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,417,588,000	1,390,486,340	-27,101,660
4.06	4	6	3	15	25				Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Luar Negeri	1,318,000,000	1,308,370,520	-9,629,480
4.06	4	6	3	15	25	5	2	1	Belanja Pegawai	12,000,000	12,000,000	0
4.06	4	6	3	15	25	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,306,000,000	1,296,370,520	-9,629,480
4.06	4	6	3	16					PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2,105,000,000	2,098,500,000	-6,500,000
4.06	4	6	3	16	26				Kegiatan Penyusunan/kajian Produk Hukum Daerah	2,105,000,000	2,098,500,000	-6,500,000
4.06	4	6	3	16	26	5	2	1	Belanja Pegawai	1,187,400,000	1,182,400,000	-5,000,000
4.06	4	6	3	16	26	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	917,600,000	916,100,000	-1,500,000
4.06	4	6	3	17					PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH	32,538,410,000	30,858,729,284	-1,679,680,716
4.06	4	6	3	17	1				Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	900,000,000	879,549,106	-20,450,894
4.06	4	6	3	17	1	5	2	1	Belanja Pegawai	5,600,000	5,600,000	0
4.06	4	6	3	17	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	894,400,000	873,949,106	-20,450,894
4.06	4	6	3	17	2				Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Provinsi Jateng	760,000,000	752,963,674	-7,036,326

4.06	4	6	3	17	2	5	2	1	Belanja Pegawai	3,200,000	2,600,000	-600,000
4.06	4	6	3	17	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	756,800,000	750,363,674	-6,436,326
4.06	4	6	3	17	3				Kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan Ulp Pemprov Jawa Tengah	6,108,805,000	5,466,342,877	-642,462,123
4.06	4	6	3	17	3	5	2	1	Belanja Pegawai	14,000,000	14,000,000	0
4.06	4	6	3	17	3	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	6,094,805,000	5,452,342,877	-642,462,123
4.06	4	6	3	17	4				Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	950,000,000	941,048,120	-8,951,880
4.06	4	6	3	17	4	5	2	1	Belanja Pegawai	1,900,000	1,500,000	-400,000
4.06	4	6	3	17	4	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	948,100,000	939,548,120	-8,551,880
4.06	4	6	3	17	5				Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/kota	167,500,000	142,535,140	-24,964,860
4.06	4	6	3	17	5	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	167,500,000	142,535,140	-24,964,860
4.06	4	6	3	17	6				Kegiatan Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	678,105,000	675,580,500	-2,524,500
4.06	4	6	3	17	6	5	2	1	Belanja Pegawai	2,400,000	2,400,000	0
4.06	4	6	3	17	6	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	675,705,000	673,180,500	-2,524,500
4.06	4	6	3	17	7				Kegiatan Penyusunan Lkjp Gubernur Jawa Tengah	1,575,000,000	1,486,956,850	-88,043,150
4.06	4	6	3	17	7	5	2	1	Belanja Pegawai	904,750,000	832,650,000	-72,100,000
4.06	4	6	3	17	7	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	670,250,000	654,306,850	-15,943,150
4.06	4	6	3	17	8				Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Apbd (tepra) Provinsi Jateng Dan Kabupaten/ Kota	400,000,000	396,863,264	-3,136,736
4.06	4	6	3	17	8	5	2	1	Belanja Pegawai	1,200,000	1,200,000	0
4.06	4	6	3	17	8	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	398,800,000	395,663,264	-3,136,736
4.06	4	6	3	17	9				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan	550,000,000	473,190,268	-76,809,732
4.06	4	6	3	17	9	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	550,000,000	473,190,268	-76,809,732
4.06	4	6	3	17	10				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Dbhcht	1,000,000,000	945,754,516	-54,245,484
4.06	4	6	3	17	10	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,000,000,000	945,754,516	-54,245,484
4.06	4	6	3	17	11				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm	500,000,000	494,990,000	-5,010,000
4.06	4	6	3	17	11	5	2	1	Belanja Pegawai	31,600,000	31,600,000	0
4.06	4	6	3	17	11	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	468,400,000	463,390,000	-5,010,000
4.06	4	6	3	17	12				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keuangan	400,000,000	310,440,529	-89,559,471
4.06	4	6	3	17	12	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	400,000,000	310,440,529	-89,559,471
4.06	4	6	3	17	13				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Jasa Dan Produksi	250,000,000	215,067,389	-34,932,611
4.06	4	6	3	17	13	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	250,000,000	215,067,389	-34,932,611

4.06	4	6	3	17	14				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan	264,000,000	262,823,330	-1,176,670
4.06	4	6	3	17	14	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	264,000,000	262,823,330	-1,176,670
4.06	4	6	3	17	15				Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata	180,000,000	175,598,670	-4,401,330
4.06	4	6	3	17	15	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	180,000,000	175,598,670	-4,401,330
4.06	4	6	3	17	16				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan	1,500,000,000	1,396,140,550	-103,859,450
4.06	4	6	3	17	16	5	2	1	Belanja Pegawai	208,000,000	192,150,000	-15,850,000
4.06	4	6	3	17	16	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,292,000,000	1,203,990,550	-88,009,450
4.06	4	6	3	17	17				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	350,000,000	330,021,500	-19,978,500
4.06	4	6	3	17	17	5	2	1	Belanja Pegawai	24,000,000	17,500,000	-6,500,000
4.06	4	6	3	17	17	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	326,000,000	312,521,500	-13,478,500
4.06	4	6	3	17	18				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan	565,000,000	514,044,695	-50,955,305
4.06	4	6	3	17	18	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	565,000,000	514,044,695	-50,955,305
4.06	4	6	3	17	19				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	550,000,000	458,946,499	-91,053,501
4.06	4	6	3	17	19	5	2	1	Belanja Pegawai	44,450,000	40,050,000	-4,400,000
4.06	4	6	3	17	19	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	505,550,000	418,896,499	-86,653,501
4.06	4	6	3	17	20				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	700,000,000	690,276,365	-9,723,635
4.06	4	6	3	17	20	5	2	1	Belanja Pegawai	2,800,000	2,800,000	0
4.06	4	6	3	17	20	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	697,200,000	687,476,365	-9,723,635
4.06	4	6	3	17	21				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	225,000,000	218,681,137	-6,318,863
4.06	4	6	3	17	21	5	2	1	Belanja Pegawai	35,900,000	35,000,000	-900,000
4.06	4	6	3	17	21	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	189,100,000	183,681,137	-5,418,863
4.06	4	6	3	17	22				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Catatan Sipil	250,000,000	249,173,518	-826,482
4.06	4	6	3	17	22	5	2	1	Belanja Pegawai	12,750,000	12,750,000	0
4.06	4	6	3	17	22	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	237,250,000	236,423,518	-826,482
4.06	4	6	3	17	23				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	250,000,000	230,971,401	-19,028,599
4.06	4	6	3	17	23	5	2	1	Belanja Pegawai	23,250,000	22,950,000	-300,000

4.06	4	6	3	17	23	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	226,750,000	208,021,401	-18,728,599
4.06	4	6	3	17	24				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	275,000,000	255,143,094	-19,856,906
4.06	4	6	3	17	24	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	275,000,000	255,143,094	-19,856,906
4.06	4	6	3	17	25				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral	275,000,000	267,951,650	-7,048,350
4.06	4	6	3	17	25	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	275,000,000	267,951,650	-7,048,350
4.06	4	6	3	17	26				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	200,000,000	198,488,200	-1,511,800
4.06	4	6	3	17	26	5	2	1	Belanja Pegawai	40,000,000	40,000,000	0
4.06	4	6	3	17	26	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	160,000,000	158,488,200	-1,511,800
4.06	4	6	3	17	27				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	450,000,000	446,635,574	-3,364,426
4.06	4	6	3	17	27	5	2	1	Belanja Pegawai	83,500,000	83,300,000	-200,000
4.06	4	6	3	17	27	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	366,500,000	363,335,574	-3,164,426
4.06	4	6	3	17	28				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan	1,600,000,000	1,588,443,618	-11,556,382
4.06	4	6	3	17	28	5	2	1	Belanja Pegawai	139,600,000	139,600,000	0
4.06	4	6	3	17	28	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,460,400,000	1,448,843,618	-11,556,382
4.06	4	6	3	17	29				Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/kota	525,000,000	523,882,536	-1,117,464
4.06	4	6	3	17	29	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	525,000,000	523,882,536	-1,117,464
4.06	4	6	3	17	30				Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	775,000,000	760,693,980	-14,306,020
4.06	4	6	3	17	30	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	775,000,000	760,693,980	-14,306,020
4.06	4	6	3	17	31				Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan	625,000,000	571,319,620	-53,680,380
4.06	4	6	3	17	31	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	625,000,000	571,319,620	-53,680,380
4.06	4	6	3	17	32				Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	1,275,000,000	1,224,322,593	-50,677,407
4.06	4	6	3	17	32	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,275,000,000	1,224,322,593	-50,677,407
4.06	4	6	3	17	33				Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan	1,050,000,000	981,554,639	-68,445,361
4.06	4	6	3	17	33	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,050,000,000	981,554,639	-68,445,361
4.06	4	6	3	17	34				Kegiatan Pengembangan Sistem Akip Dan Pembangunan Zona Integritas	925,000,000	875,163,659	-49,836,341
4.06	4	6	3	17	34	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	925,000,000	875,163,659	-49,836,341
4.06	4	6	3	17	35				Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi	755,000,000	739,708,223	-15,291,777

4.06	4	6	3	17	35	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	755,000,000	739,708,223	-15,291,777
4.06	4	6	3	17	36				Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	1,130,000,000	1,130,000,000	0
4.06	4	6	3	17	36	5	2	1	Belanja Pegawai	408,100,000	408,100,000	0
4.06	4	6	3	17	36	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	721,900,000	721,900,000	0
4.06	4	6	3	17	37				Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Jdi Hukum	850,000,000	849,377,000	-623,000
4.06	4	6	3	17	37	5	2	1	Belanja Pegawai	2,400,000	2,400,000	0
4.06	4	6	3	17	37	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	802,600,000	802,102,000	-498,000
4.06	4	6	3	17	37	5	2	3	Belanja Modal	45,000,000	44,875,000	-125,000
4.06	4	6	3	17	38				Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Sengketa Hukum	1,525,000,000	1,525,000,000	0
4.06	4	6	3	17	38	5	2	1	Belanja Pegawai	211,000,000	211,000,000	0
4.06	4	6	3	17	38	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,314,000,000	1,314,000,000	0
4.06	4	6	3	17	39				Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi Ham Dan Aksi Ppk	580,000,000	580,000,000	0
4.06	4	6	3	17	39	5	2	1	Belanja Pegawai	-	-	0
4.06	4	6	3	17	39	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	580,000,000	580,000,000	0
4.06	4	6	3	17	40				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	350,000,000	346,265,500	-3,734,500
4.06	4	6	3	17	40	5	2	1	Belanja Pegawai	10,000,000	10,000,000	0
4.06	4	6	3	17	40	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	340,000,000	336,265,500	-3,734,500
4.06	4	6	3	17	41				Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	300,000,000	286,819,500	-13,180,500
4.06	4	6	3	17	41	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	300,000,000	286,819,500	-13,180,500
4.06	4	6	3	18					PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	3,513,000,000	3,218,189,711	-294,810,289
4.06	4	6	3	18	1				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Dan Penganggaran	90,000,000	86,999,000	-3,001,000
4.06	4	6	3	18	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	90,000,000	86,999,000	-3,001,000
4.06	4	6	3	18	2				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	200,000,000	191,340,191	-8,659,809
4.06	4	6	3	18	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	200,000,000	191,340,191	-8,659,809
4.06	4	6	3	18	3				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm	500,000,000	491,078,200	-8,921,800
4.06	4	6	3	18	3	5	2	1	Belanja Pegawai	800,000	800,000	0
4.06	4	6	3	18	3	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	499,200,000	490,278,200	-8,921,800

4.06	4	6	3	18	4				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Keuangan	410,000,000	360,208,847	-49,791,153
4.06	4	6	3	18	4	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	410,000,000	360,208,847	-49,791,153
4.06	4	6	3	18	5				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi	250,000,000	163,832,650	-86,167,350
4.06	4	6	3	18	5	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	250,000,000	163,832,650	-86,167,350
4.06	4	6	3	18	6				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan	68,000,000	67,128,699	-871,301
4.06	4	6	3	18	6	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	68,000,000	67,128,699	-871,301
4.06	4	6	3	18	7				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata	150,000,000	148,561,574	-1,438,426
4.06	4	6	3	18	7	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	150,000,000	148,561,574	-1,438,426
4.06	4	6	3	18	8				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan	300,000,000	283,615,362	-16,384,638
4.06	4	6	3	18	8	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	300,000,000	283,615,362	-16,384,638
4.06	4	6	3	18	9				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	160,000,000	159,627,300	-372,700
4.06	4	6	3	18	9	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	160,000,000	159,627,300	-372,700
4.06	4	6	3	18	10				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	95,000,000	86,642,122	-8,357,878
4.06	4	6	3	18	10	5	2	1	Belanja Pegawai	7,375,000	3,175,000	-4,200,000
4.06	4	6	3	18	10	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	87,625,000	83,467,122	-4,157,878
4.06	4	6	3	18	11				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	80,000,000	58,979,783	-21,020,217
4.06	4	6	3	18	11	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	80,000,000	58,979,783	-21,020,217
4.06	4	6	3	18	12				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	50,000,000	44,239,703	-5,760,297
4.06	4	6	3	18	12	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	50,000,000	44,239,703	-5,760,297
4.06	4	6	3	18	13				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil	50,000,000	50,000,000	0
4.06	4	6	3	18	13	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	50,000,000	50,000,000	0
4.06	4	6	3	18	14				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	50,000,000	39,375,600	-10,624,400

4.06	4	6	3	18	14	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	50,000,000	39,375,600	-10,624,400
4.06	4	6	3	18	15				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum	160,000,000	128,846,000	-31,154,000
4.06	4	6	3	18	15	5	2	1	Belanja Pegawai	16,600,000	15,000,000	-1,600,000
4.06	4	6	3	18	15	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	143,400,000	113,846,000	-29,554,000
4.06	4	6	3	18	16				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	250,000,000	246,272,100	-3,727,900
4.06	4	6	3	18	16	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	250,000,000	246,272,100	-3,727,900
4.06	4	6	3	18	17				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	100,000,000	99,481,000	-519,000
4.06	4	6	3	18	17	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	100,000,000	99,481,000	-519,000
4.06	4	6	3	18	18				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100,000,000	91,146,154	-8,853,846
4.06	4	6	3	18	18	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	100,000,000	91,146,154	-8,853,846
4.06	4	6	3	18	19				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	100,000,000	91,600,500	-8,399,500
4.06	4	6	3	18	19	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	100,000,000	91,600,500	-8,399,500
4.06	4	6	3	18	20				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	120,000,000	118,128,000	-1,872,000
4.06	4	6	3	18	20	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	120,000,000	118,128,000	-1,872,000
4.06	4	6	3	18	21				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan Dan Perikanan	80,000,000	78,268,726	-1,731,274
4.06	4	6	3	18	21	5	2	1	Belanja Pegawai	-	-	0
4.06	4	6	3	18	21	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	80,000,000	78,268,726	-1,731,274
4.06	4	6	3	18	22				Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan	150,000,000	132,818,200	-17,181,800
4.06	4	6	3	18	22	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	150,000,000	132,818,200	-17,181,800
4.06	4	6	3	19					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,210,978,000	2,188,951,278	-22,026,722
4.06	4	6	3	19	1				Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah	774,700,000	772,415,480	-2,284,520
4.06	4	6	3	19	1	5	2	1	Belanja Pegawai	22,000,000	22,000,000	0
4.06	4	6	3	19	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	752,700,000	750,415,480	-2,284,520

4.06	4	6	3	19	2				Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	357,349,000	338,981,058	-18,367,942
4.06	4	6	3	19	2	5	2	1	Belanja Pegawai	1,500,000	1,500,000	0
4.06	4	6	3	19	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	355,849,000	337,481,058	-18,367,942
4.06	4	6	3	19	3				Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu	404,250,000	403,176,100	-1,073,900
4.06	4	6	3	19	3	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	404,250,000	403,176,100	-1,073,900
4.06	4	6	3	19	4				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	674,679,000	674,378,640	-300,360
4.06	4	6	3	19	4	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	674,679,000	674,378,640	-300,360
4.06	4	6	3	20					PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	2,685,290,000	2,644,486,381	-40,803,619
4.06	4	6	3	20	1				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah	1,573,950,000	1,539,674,131	-34,275,869
4.06	4	6	3	20	1	5	2	1	Belanja Pegawai	312,600,000	307,600,000	-5,000,000
4.06	4	6	3	20	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,261,350,000	1,232,074,131	-29,275,869
4.06	4	6	3	20	2				Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses Paw Anggota Dprd	1,111,340,000	1,104,812,250	-6,527,750
4.06	4	6	3	20	2	5	2	1	Belanja Pegawai	4,000,000	4,000,000	0
4.06	4	6	3	20	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,107,340,000	1,100,812,250	-6,527,750
4.06	4	6	3	21					PELAYANAN UMUM, KEPROTOKOLAN, DAN KEHUMASAN	29,240,000,000	26,521,076,418	-2,718,923,582
4.06	4	6	3	21	1				Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Dan Daerah	725,000,000	586,863,739	-138,136,261
4.06	4	6	3	21	1	5	2	1	Belanja Pegawai	153,500,000	126,500,000	-27,000,000
4.06	4	6	3	21	1	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	571,500,000	460,363,739	-111,136,261
4.06	4	6	3	21	2				Kegiatan Pembuatan Naskah Dan Himpunan Sambutan/ Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah	580,000,000	574,116,657	-5,883,343
4.06	4	6	3	21	2	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	580,000,000	574,116,657	-5,883,343
4.06	4	6	3	21	3				Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	5,800,000,000	4,734,608,074	-1,065,391,926
4.06	4	6	3	21	3	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	5,800,000,000	4,734,608,074	-1,065,391,926
4.06	4	6	3	21	4				Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum	550,000,000	301,658,944	-248,341,056
4.06	4	6	3	21	4	5	2	1	Belanja Pegawai	4,800,000	2,400,000	-2,400,000
4.06	4	6	3	21	4	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	545,200,000	299,258,944	-245,941,056
4.06	4	6	3	21	5				Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah	10,500,000,000	9,754,295,442	-745,704,558
4.06	4	6	3	21	5	5	2	1	Belanja Pegawai	544,800,000	48,000,000	-496,800,000
4.06	4	6	3	21	5	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	9,955,200,000	9,706,295,442	-248,904,558
4.06	4	6	3	21	6				Kegiatan Keprotokolan	2,125,000,000	2,078,982,735	-46,017,265
4.06	4	6	3	21	6	5	2	1	Belanja Pegawai	240,800,000	232,000,000	-8,800,000

4.06	4	6	3	21	6	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,884,200,000	1,846,982,735	-37,217,265
4.06	4	6	3	21	7				Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Dan Harga	800,000,000	732,441,929	-67,558,071
4.06	4	6	3	21	7	5	2	1	Belanja Pegawai	379,400,000	379,400,000	0
4.06	4	6	3	21	7	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	420,600,000	353,041,929	-67,558,071
4.06	4	6	3	21	8				Kegiatan Sinkronisasi Program Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1,840,000,000	1,821,170,313	-18,829,687
4.06	4	6	3	21	8	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	1,840,000,000	1,821,170,313	-18,829,687
4.06	4	6	3	21	9				Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	6,320,000,000	5,936,938,585	-383,061,415
4.06	4	6	3	21	9	5	2	1	Belanja Pegawai	449,275,000	425,775,000	-23,500,000
4.06	4	6	3	21	9	5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	5,870,725,000	5,511,163,585	-359,561,415

Sumber: BPKAD Prov. Jawa Tengah, 2020

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peningkatan sinergitas kebijakan daerah sebagai Sasaran I (Pertama) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 dilaksanakan melalui pencapaian 7 (tujuh) indikator sasaran oleh 6 (enam) Biro dengan rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 110,85% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Pencapaian atas indikator sasaran tersebut sinergis dengan pencapaian indikator tujuan, yaitu: Persentase Kebijakan yang Efektif dengan realisasi sebesar 93,02% terhadap target 80% atau berada pada tingkat capaian 116,28% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator tujuan ini adalah Rp 8,891,539,000,- dengan realisasi sebesar Rp 8,488,100,769,- atau 95,46% dengan pencapaian kinerja yang melampaui target perencanaan sehingga terwujud **efisiensi belanja sebesar 4,54%**.
2. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Sasaran II (Kedua) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 dilaksanakan melalui pencapaian 21 (dua puluh satu) indikator sasaran oleh 9 (sembilan) Biro dengan rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 115,45% atau masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Pencapaian atas indikator sasaran tersebut sinergis dengan pencapaian indikator tujuan, yaitu: Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 86,36% terhadap target 80% atau berada pada tingkat capaian 107,14% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator tujuan ini adalah Rp 37,347,678,000,- dengan realisasi sebesar Rp 35,646,202,025,- atau 95,44% dengan pencapaian kinerja yang melampaui target perencanaan sehingga terwujud **efisiensi belanja sebesar 4,56%**.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator tujuan

persentase peningkatan kualitas pelayanan umum di Setda terealisasi 75,63% terhadap target 75% atau berada pada tingkat capaian 100,84% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Indikator tujuan ini didapat dari capaian indikator kinerja sasaran persentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan, dan kehumasan yang menjadi tanggung jawab kinerja Biro Umum. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator tujuan ini adalah Rp 104.964.783.000 dengan realisasi sebesar Rp 97.149.745.215 atau 92,55% dengan kinerja yang melampaui target perencanaan sehingga terwujud **efisiensi belanja sebesar 7,45%**.

4. Guna mewujudkan kinerja tahun 2019 sebagaimana telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berhasil melaksanakan 9 program dan 153 kegiatan dengan dukungan anggaran sejumlah **Rp. 161.124.000.000,-** (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta rupiah) dengan capaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 150.485.141.223 atau (95,10%)
5. Permasalahan yang Berkaitan dengan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah yang tidak mencapai target adalah indikator persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan sumber daya alam yang dievaluasi pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan indikator persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi pada Biro Perekonomian. Sebagai koordinator pelaksanaan fungsi perangkat daerah, Biro-biro pada lingkup Sekretariat Daerah perlu meningkatkan fasilitasi/intervensi kepada OPD ampunan utamanya dalam hal perumusan strategi pencapaian indikator kinerja kegiatan, program hingga Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Lebih lanjut diperlukan penguatan landasan hukum sebagai dasar operasional pengendalian pencapaian target-target pembangunan daerah oleh seluruh biro lingkup Setda. Hal tersebut untuk meningkatkan efektifitas pengendalian pencapaian atas target-target pembangunan daerah.

A. SARAN

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pengendalian Pencapaian Target-Target Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perumusan Bisnis Proses pelaksanaan tugas dan fungsi Setda secara integratif dan komprehensif sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Setda dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah mengoptimalkan pemanfaatan *e-Controlling Kinerja* sebagai instrumen pengendalian pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Semarang, 2020

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

Asisten Administrasi

u.b.

**Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Daerah**

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196610161992032006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHSEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP.

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP.

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2019

Pihak kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH


H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No. (1)	TUJUAN/SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
TUJUAN :			
	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	1) Persentase Kebijakan yang Efektif 2) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 3) Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	80 80 100
SASARAN :			
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1) Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi 2) Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi 3) Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif 4) Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan 5) Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi 6) Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi 7) Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	85 85 70 85 80 90 81

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Efektifitas dan efisiensi pemerintahan, dan efisiensi kelembagaan serta manajemen sumber daya aparatur	1) Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah 2) Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan Pembangunan di Kabupaten/Kota 3) Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan 4) Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota 5) Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan 6) Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum 7) Nilai kematangan organisasi daerah 8) Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik 9) Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B 10) Persentase kabupaten/ kota yang meningkatkan indeks RB nya 11) Prosentase Perangda yang Nilai Sakip nya B ke atas 12) Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 13) Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	80 80 80 90 90 90 19 52,10 73 25 68 80 85

No. (1)	TUJUAN/SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
		14) Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85
		15) Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60
		16) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85
		17) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80
		18) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100
		19) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85
		20) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100
		21) Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100
		22) Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.73.595.893.000,-	APBD
2.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 300.000.000,-	APBD
3.	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.851.088.000,-	APBD
4.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.980.000.000,-	APBD
5.	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Rp. 34.524.000.000,-	APBD
6.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	Rp. 3.573.000.000,-	APBD
7.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.134.729.000,-	APBD
8.	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.2.685.290.000,-	APBD
9.	Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	Rp.25.690.000.000,-	APBD
10.	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.62.956.092.000,-	APBD

Semarang, 2019

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH PROV JATENG

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP



Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP

Pejabat Utama

NIP. 19600229 198603 1 004